

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam selama ini dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki ekosistem yang inklusif dan penerimaan secara kultural terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Penerimaan secara kultural tanpa adanya penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah mengakibatkan permasalahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus menuntut ilmu di madrasah. Para peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi permasalahan pembelajaran, penilaian, aksesibilitas, dan pelayanan pendidikan<sup>1</sup>.

Pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan mereka di madrasah. Merujuk pada yang bersumber dari *Education Management Information System (EMIS)* Kementerian Agama RI Tahun 2021 bahwa terdapat 10.610.942 peserta didik dan dari jumlah tersebut terdapat 47.516 peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di madrasah<sup>2</sup>. Data EMIS tahun 2022 jumlah PDBK di madrasah baik negeri maupun swasta pada jenjang RA, MI, MTs dan MA mencapai 48.423 siswa dengan berbagai jenis hambatan dari jumlah total seluruh siswa di madrasah 10.498.896 orang. Sementara itu jumlah madrasah inklusif masih sangat terbatas, dari 83.648 madrasah yang ada di Indonesia hanya 714 saja yang sudah memiliki legalitas sebagai madrasah penyelenggara pendidikan inklusif. Berdasarkan Data PBS (Profil Belajar

---

<sup>1</sup> Nugraha, . Implementasi Program Tahfidz Qur'an Di PAUD Inklusif dengan Model HOTS. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 2020.h. 95–106.

<sup>2</sup> <https://emis.kemenag.go.id/> Accessed on November 13, 2024

Siswa) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan pembaruan terakhir 16 Desember 2025, terlihat bahwa pengelolaan dan pelaporan data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di madrasah telah berjalan, namun pendataan PBS di madrasah Provinsi Bengkulu belum optimal dan belum merata<sup>3</sup>. Madrasah menghadapi tantangan serius dalam menangani PDBK dengan hambatan sedang hingga berat. Ragam hambatan yang kompleks menuntut strategi pembelajaran inklusif yang adaptif dan berbasis kebutuhan nyata peserta didik. Terdapat ketimpangan antar wilayah yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, penelitian mengenai pendidikan inklusif, kesiapan guru, kebijakan madrasah, model layanan PBS, atau efektivitas pendataan PBS menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah di Provinsi Bengkulu.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat sejumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang belum diberikan akomodasi yang layak dalam pendidikan di madrasah karena belum terdaftar sebagai madrasah inklusif bahkan para tenaga pendidiknya belum mendapatkan pemahaman atau pembekalan tentang pendidikan inklusif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif masih mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi selama ini adalah kurangnya pengetahuan guru tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Hambatan lainnya yaitu tenaga pendidik yang kurang terlatih, stigma negatif, kebijakan otoritas yang kurang aplikatif, kurangnya pengetahuan tenaga didik, hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber belajar, keterbatasan finansial<sup>4</sup>. Kurang

---

<sup>3</sup><https://kemenag.go.id/> Accessed on 16 Desember, 2025

<sup>4</sup> Sari & Hendriani. Hambatan Pendidikan Inklusif dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis dari Berbagai Negara <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/14154,2021.h> 35

tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya dalam sistem pendidikan madrasah yang inklusif maka perlu penerapan program pelayanan secara bertahap. Pengembangan program layanan pendidikan Islam inklusif pada madrasah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dan komprehensif mencakup semua komponen pendidikan di madrasah<sup>5</sup>.

Paradigma pendidikan inklusif bisa menjadi solusi bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus merasa kurang percaya diri ketika harus berkumpul dengan mereka yang memiliki fisik normal. Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan inklusif merupakan lembaga pendidikan yang memperhatikan keragaman dan kebutuhan individu terhadap semua siswa yang belajar di sekolah umum, agar potensi anak berkembang secara optimal<sup>6</sup>. Inklusif merupakan jawaban dan respon keragaman individu untuk meningkatkan partisipasi belajar, budaya, masyarakat agar eksklusi baik dalam maupun kegiatan pendidikan berkurang<sup>7</sup>. Menerima siswa berkebutuhan khusus bersama siswa reguler untuk belajar di kelas inklusif dengan terbuka dan tanpa diskriminasi merupakan unsur penting dalam pendidikan inklusif. Sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan setiap

---

<sup>5</sup> Eem Merani Destiana, Nur Puspasari, & Desy Eka Citra Dewi. Evaluasi Strategi Pengembangan Stakeholders dalam Penguatan Kelembagaan Pendidikan Islam. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2),(2025). 173–188.

<sup>6</sup> Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1),2022. 339–348.

<sup>7</sup> Bahri, S. Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1),2022,h. 94–100.

individu merupakan sekolah inklusif. Perkembangan akademik, fisik, sosial, emosi dicapai anak pada proses belajar sesuai kemampuan dan kecepatannya masing-masing.

Beberapa hasil penelitian tentang pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus di madrasah diantaranya pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus disabilitas netra dan evaluasi pembelajarannya<sup>8</sup>, studi lainnya membahas tentang pengembangan buku pedoman tentang mutu pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah<sup>9</sup>, Studi selanjutnya Pasca terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hingga sekarang telah berkembang pesat yang banyak pada studi kasus pendidikan inklusif pada sejumlah madrasah<sup>10</sup>. Melihat kecenderungan sejumlah studi yang ada tampak telah menggambarkan perkembangan madrasah dan anak berkebutuhan khusus urgensi hingga penerapan kurikulum, model, dan implementasi, hingga pada sejumlah kajian mutakhir yang menunjukkan implementasi pendidikan inklusif di madrasah dengan studi kasus di berbagai madrasah setiap jenjang dan di berbagai provinsi.

Pada penelitian Fitriana<sup>11</sup> mengkaji tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara, pada penelitian ini mengevaluasi rencana pengembangan sekolah, anggaran khusus, kurikulum, pengembangan studi individu. Dalam penelitian ini

---

<sup>8</sup> Yuyun Rahmahdhani Khusniyah. "Evaluasi Program Pembelajaran Matematika Siswa Tunanetra Kelas 2 Di Sekolah Inklusif Madrasah Aliyah Negeri (Man) Maguwoharjo Sleman Yogyakarta." *Widia Ortodidaktik* 4.5 2015

<sup>9</sup> Srinugraheni, et.al. "Pengembangan Buku Pedoman Manajemen Mutu Pengelolaan Pendidikan Islam Inklusif di Madrasah Se-DIY." *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 2.1.2016: 4358.

<sup>10</sup> Sulthon. "Model Pelayanan Pendidikan Inklusif Di Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus." *Al-Bidayah: jurnal pendidikan dasar Islam* 10.2 .2018: 151-172.

<sup>11</sup> Fitriana, F., Lestari, I., & Sapriati, A. Evaluasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(2), 2022.191–200.

juga menggunakan model CIPP. Penelitian yang dilakukan oleh Mumpuniarti & Lestari<sup>12</sup> memaparkan bahwa guru di tingkat taman kanak-kanak memiliki sikap positif dan kemauan menerima yang lebih tinggi. Di tingkat SD dan SMP, masih ada beberapa sekolah yang merasa belum siap menerima keberagaman siswa di kelasnya. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat Taman Kanak-Kanak mengalami kemajuan dalam kesadaran kelas akan keragaman siswa. Penelitian ini juga relevan dengan penelitian Yuwono & Mirnawati<sup>13</sup> Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk peserta didik ABK di Sekolah Dasar mencakup pengajaran remedial, strategi deduktif dan induktif, pendekatan heuristik, ekspositori, pembelajaran klasikal, pembelajaran kooperatif, serta teknik perubahan perilaku.

Guru disarankan untuk menggunakan media pembelajaran yang cocok bagi siswa berkebutuhan khusus, seperti puzzle, untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat juga penelitian Angreni & Sari<sup>14</sup> dalam penelitiannya, berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan media, dan strategi pembelajaran yang relatif sama dengan siswa normal. Selama pelajaran, kelas dan model pelayanannya juga tidak berbeda dari siswa biasa. Meski demikian, beberapa sekolah telah memodifikasi proses pembelajaran, baik dalam hal rencana pembelajaran, media dan strategi pembelajaran, maupun persyaratan kurikulum.

---

<sup>12</sup> Mumpuniarti, M., & Lestari, P. H. K.. Kesiapan Guru Sekolah Reguler Untuk Implementasi Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 14(2), 2019.h.57–66

<sup>13</sup> Yuwono, I., & Mirnawati, M. Strategi Pembelajaran Kreatif Dalam Pendidikan Inklusif Di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2021. h.2015–2020.

<sup>14</sup> Angreni, S., & Sari, R. T. Analisis Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusif Kota Padang. 8(1),2022. h. 94–102.

Pendidikan bagi anak disabilitas sangat penting dan membantu dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam hidupnya, dengan demikian pendidikan sangat dibutuhkan dalam hidup anak disabilitas<sup>15</sup>. Dengan demikian tidak terpenuhinya pendidikan bagi mereka berarti belum tercapai kemerdekaan dalam hidup dan keadilan bagi anak disabilitas. Layanan pendidikan bagi anak disabilitas dengan model SLB dan SDLB yang berjalan selama ini masih belum cukup memberikan fasilitas yang memadai bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, dengan demikian perlu diupayakan melalui program pendidikan inklusif.

Landasan teori inklusif dalam pendidikan mencakup beberapa prinsip dasar yang mendasari penerapan pendidikan inklusif. Prinsip-prinsip ini berhubungan dengan pemahaman teori tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, serta pemenuhan kebutuhan setiap individu dalam lingkungan pendidikan. Beberapa landasan teori inklusif yang utama adalah pendidikan inklusif berakar pada filosofi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Semua anak, tanpa terkecuali, berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi mereka. Filosofi ini menekankan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan tidak ada diskriminasi dalam proses pembelajaran<sup>16</sup>.

Dalam perspektif psikologi, teori inklusif didasari oleh pemahaman bahwa setiap anak berkembang dengan cara yang unik, dan pembelajaran

---

<sup>15</sup> Haryono, Syaifudin A, and Widiastuti S, "Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Penelitian Pendidikan* (2015): hlm. 104.

<sup>16</sup> Mohammad Takdir. *Pendidikan Inklusif: Konsep & Aplikasi*. (Jogjakarta: Ar Ruzz,2013) h. 25

harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, serta gaya belajar mereka. Teori perkembangan kognitif (seperti yang dikemukakan oleh Piaget) dan teori belajar konstruktivisme (seperti yang dikemukakan oleh Vygotsky) memberikan dasar psikologis bahwa setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat berkembang jika diberi kesempatan belajar yang sesuai.

Sejarah pendidikan inklusif semakin berkembang setelah diadakannya *World Conference on Special Needs Education* di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994. Dalam konferensi ini, hampir 100 negara menyetujui *Salamanca Statement* yang mengajak semua negara untuk memberikan pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan<sup>17</sup>. Deklarasi ini mendorong perubahan besar dalam cara negara-negara memandang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, pendidikan di Indonesia sangat terpisah antara anak dengan kebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Pendidikan untuk anak-anak dengan disabilitas umumnya diselenggarakan dalam lembaga khusus, seperti sekolah luar biasa (SLB). Namun, konsep pendidikan inklusif mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-20, seiring dengan semakin banyaknya negara yang mulai menerapkan sistem inklusif di pendidikan<sup>18</sup>. Pendidikan Inklusif di Indonesia salah satunya berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan inklusif.

---

<sup>17</sup> UNESCO. (1994). *Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO.

<sup>18</sup> Dalky, H. Inklusif pendidikan di Indonesia: Perspektif dan tantangan. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 3(1),2018.h. 1-10.

Salah satu penekanan utama dalam SDGs adalah pendidikan inklusif, yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, disabilitas, etnis, maupun kondisi geografis, memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan bermutu. Pendidikan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai integrasi peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan eksklusi dalam proses pembelajaran<sup>19</sup>. Lebih lanjut, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan hak asasi manusia, bukan pilihan kebijakan. Negara-negara anggota PBB berkewajiban menyelaraskan kebijakan pendidikan nasionalnya dengan prinsip-prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs. Kegagalan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif berarti pelanggaran terhadap komitmen global yang telah disepakati bersama<sup>20</sup>. Dengan demikian, dukungan terhadap pendidikan inklusif bukan hanya kebutuhan lokal atau nasional, melainkan tuntutan global yang harus direspons secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Implementasi pendidikan inklusif menjadi indikator nyata keseriusan suatu negara dalam menjalankan agenda SDGs dan berkontribusi terhadap pembangunan dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menegaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti implementasinya dengan melebur pada lembaga

---

<sup>19</sup> Ainscow, M. *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(1),2020. 7–16.

<sup>20</sup> UNESCO. *Global education monitoring report: Inclusion and education*. (Paris: UNESCO:2020)

pendidikan reguler, tidak ditempatkan di lembaga pendidikan khusus. Hal demikian ini mendorong Kementerian Agama untuk mengakselerasi kesiapan madrasah inklusif dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 758 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah. Madrasah inklusif merupakan madrasah yang memberikan pelayanan kepada warga negara dengan keanekaragaman peserta didik, termasuk di dalamnya menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Madrasah yang sudah memiliki Surat Penetapan sebagai madrasah inklusif di provinsi Bengkulu berjumlah 13 madrasah dan hanya terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah karena ketersediaan anak berkebutuhan khusus dan madrasah tersebut layak menerapkan layanan pendidikan inklusif. Penetapan madrasah inklusif tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kemenag Bengkulu Tengah Nomor 10 tahun 2024.

Berdasarkan penelitian awal ditemukan bahwa di salah satu Madrasah Ibtidaiyah inklusif Al Hizam di Bengkulu Tengah ditemukan banyak anak yang memiliki hambatan fisik dan memiliki intelektual rendah di bawah rata-rata yang dilayani di Madrasah Ibtidaiyah ini, dalam layanan pendidikan, guru memberikan pelajaran secara umum kemudian bagi anak yang memiliki hambatan fisik (PDBK) selanjutnya diberikan pembinaan secara khusus di ruang sumber oleh terapis dan terjadwal pada waktu istirahat. Sebenarnya ini merupakan praktik madrasah inklusif sehingga penelitian ini bersifat rintisan model inklusif di Madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan agama Islam tentunya lebih memiliki kepekaan dan ramah terhadap anak disabilitas karena merupakan ajaran yang ditekankan dalam Islam sebagai amalan sholihan dan wujud rasa pengabdian pada sesama,

karena didasarkan pada Firman Allah *Qur'an Surat An-Nur: 61* sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَوْلِيَاءِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرْجٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ □

*Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.*

Ayat di atas memberikan perintah untuk tidak membedakan manusia berdasarkan kecacatan dalam berinteraksi atau bergaul dengannya, hal ini sejalan dengan memberikan layanan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas bersama dengan anak normal. Dengan demikian madrasah inklusif merupakan anjuran dalam agama Islam tanpa membedakan anak dari perbedaan individu, karena dalam Islam yang dinilai di sisi Allah bukan fisiknya tapi Allah SWT melihat hati dan perbuatannya. Berdasarkan uraian di atas, maka anak disabilitas harus memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuannya

bersama teman sebayanya dan di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Berdasarkan surah Al Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal, bukan untuk membanggakan diri atau merendahkan yang lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.*

Ayat di atas memberitahukan bahwa Allah SWT menciptakan anak cucu Adam dari asal usul dan diri yang satu, semua keturunan Adam berasal dari lelaki dan perempuan yang silsilah semuanya merujuk pada Adam dan Hawa. Allah mengembangbiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak, mereka kemudian disebar dan dijadikan “berbangsa-bangsa dan bersuku-suku,” yakni suku-suku yang besar dan kecil. Yang demikian itu bertujuan agar saling mengenal satu sama lain, sebab andai masing-masing orang menyendiri, tentu tidak akan tercapai tujuan saling mengenal satu sama lain yang bisa menimbulkan saling tolong menolong, bahu-membahu, saling mewarisi satu sama lain serta menunaikan hak-hak kerabat.

Adanya manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bertujuan agar berbagai hal positif tersebut bisa terwujud yang bergantung pada proses saling mengenal satu sama lain serta pemaduan nasab. Namun ukuran kemuliaan di antara mereka adalah takwa. Orang yang paling mulia di antara sesama adalah yang paling bertakwa kepada Allah, paling banyak melakukan ketaatan serta paling mampu mencegah diri dari

kemaksiatan, bukan yang paling banyak kerabat serta kaumnya, bukan yang keturunannya paling terpendang (*level social*).

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan model layanan pendidikan inklusif di Madrasah. Di Indonesia terdapat tiga model pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu; segregasi, integrasi, dan inklusif. Pendidikan segregasi secara bahasa segregate yang memiliki arti memisahkan atau *segregation* yang berarti pemisahan, yang selanjutnya diartikan sebagai sebuah proses pemisahan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik non berkebutuhan khusus. Adapun kaitannya dengan pendidikan luar biasa yang terdapat dalam sejumlah regulasi yaitu sistem pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem pendidikan pada umumnya. Pendidikan segregasi merupakan sistem layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tertua di Indonesia<sup>21</sup>. Pendidikan integrasi, secara bahasa kata integrasi berasal dari kata *integrate* yang memiliki arti menyatukan atau *integration* yang memiliki arti penyatuan.

Pendidikan integrasi adalah penyatuan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Pendidikan inklusif, secara bahasa kata inklusif berasal dari kata *include* yang memiliki arti mencantumkan, menyertakan, atau memasukkan atau *inclusion* yang memiliki arti pencantuman, penyertaan, dan penyertaan. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyerahkan atau memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya non-

---

<sup>21</sup> Ibdaul Latifah. "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusif, apa bedanya?." *Jurnal Pendidikan* 29.2 .2020: 101-108.

berkebutuhan khusus<sup>22</sup>. Masih banyak sekolah inklusif yang belum optimal pelayanannya karena banyaknya kendala terkait dengan belum siapnya guru-guru umum atau tidak memiliki pemahaman pendidikan untuk anak disabilitas, guru-guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/ pelatihan pendidikan inklusif, hal ini disebabkan ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif terbatasnya guru khusus, kurikulum inklusif, serta model pelaksanaan pendidikan yang terintegrasi dalam layanan inklusif.

Kondisi di atas perlu direspon dengan adanya percepatan penyediaan layanan pendidikan bagi anak disabilitas dengan memberdayakan madrasah sebagai bagian dari lembaga yang menangani pendidikan dibawah Kementerian Agama. Madrasah sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi dengan memberikan pendidikan yang berbasis keagamaan, juga memiliki tugas yang sama untuk memberikan pendidikan bagi anak disabilitas<sup>23</sup>.

Hasil kajian beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian tentang model pelayanan pendidikan inklusif pada pembelajaran PAI di madrasah belum banyak dikaji. Penelitian yang serupa, bidang kajiannya berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini difokuskan pada keefektifan penerapan model pelayanan pendidikan inklusif di madrasah Ibtidaiyah Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah. Teori efektivitas layanan pendidikan ditentukan oleh tingkat pencapaian tujuan (*effectiveness*) dan pemanfaatan sumber daya secara optimal

---

<sup>22</sup> Dalky, H. Inklusif pendidikan di Indonesia: Perspektif dan tantangan. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 3(1),2018.h. 1-10.

<sup>23</sup> Haryono, Syaifudin A, and Widiastuti S, "Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Provinsi Jawa Tengah,"2019. hlm. 121.

(*efficiency*)<sup>24</sup>. Keefektifan penerapan model pelayanan pendidikan inklusif dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat keberhasilan guru dalam penguasaan penerapan model layanan inklusif yang menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap model pelayanan pendidikan inklusif yang diajarkan. Fokus pada pemahaman guru dipilih karena pemahaman konseptual dan praktis guru menjadi prasyarat utama sebelum menilai efektivitas atau dampak implementasi model layanan tersebut, sehingga penelitian ini bermanfaat memetakan kesiapan dan kapasitas guru sebagai dasar pengembangan model pelayanan pendidikan inklusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Dengan membatasi fokus pada aspek pemahaman guru, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam, terarah, dan relevan dengan tujuan penelitian tanpa terjebak pada variabel yang terlalu luas. Posisi Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu terkait pentingnya pelayanan pendidikan inklusif dalam pembelajaran agama Islam di madrasah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Kurang tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya dalam sistem pendidikan madrasah yang inklusif maka perlu penerapan program pelayanan secara bertahap.
2. Masih banyak madrasah inklusif yang belum mengimplementasikan karena banyaknya kendala terkait dengan belum siapnya guru-guru umum atau tidak memiliki pemahaman pendidikan untuk anak disabilitas

---

<sup>24</sup> Campbell, J. P.. *On the Nature of Organizational Effectiveness*. In P. S. Goodman & J. M. Pennings (Eds.), *New Perspectives on Organizational Effectiveness* (pp. 13–55). San Francisco: Jossey-Bass.1977.35

3. Guru masih membutuhkan tambahan pembekalan atau pelatihan pendidikan inklusif, hal ini disebabkan ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif.
4. Terbatasnya guru khusus, kurikulum inklusif, serta model pelaksanaan pendidikan yang terintegrasi dalam layanan inklusif.
5. Tidak meratanya pendidikan bagi anak disabilitas baik melalui sistem pendidikan eksklusif dalam bentuk SLB maupun SDLB.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan diatas, batasan masalah penelitian ini akan difokuskan kepada guru yang masih membutuhkan tambahan pembekalan atau pelatihan pendidikan inklusif, terbatasnya guru khusus inklusif, serta model pelaksanaan pendidikan yang terintegrasi dalam layanan inklusif. Dengan demikian perlunya implementasi model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler, *cluster* dan *pull out* pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah ibtidaiyah inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas *cluster* pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah?
3. Bagaimana pelaksanaan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas *pull out* pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah?

4. Bagaimana keefektifan pelaksanaan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler, *cluster* dan *pull out* pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk melaksanakan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas *cluster* pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Untuk melaksanakan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas *pull out* pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Untuk menganalisis pelaksanaan model pelayanan pendidikan inklusif yang efektif pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran konstruktif bagi peningkatan pelayanan pendidikan inklusif di madrasah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya. Memberikan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut untuk melakukan penelitian pengembangan terkait model pelayanan pendidikan inklusif lainnya.
- 3.

## G. Kajian Pustaka

Kajian penelitian yang relevan dilakukan untuk dijadikan dasar menentukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler, *cluster* dan *pull out* pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah Ibtidaiyah Inklusif Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan penelitian oleh penelitian Sholikhah RM. (2016)<sup>25</sup> bahwa ditemukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Dawe Kabupaten Kudus ditemukan banyak anak yang memiliki IQ rendah di bawah rata-rata yang dilayani di MI ini, dalam layanan pendidikan, guru memberikan pelajaran secara umum kemudian bagi anak yang memiliki kemampuan rendah selanjutnya diberikan pembinaan secara khusus dan sering hingga waktu istirahat. Hasil penelitian Balitbang Kemenag tahun 2015 pada madrasah yang ditetapkan sebagai *piloting project* menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam penyelenggaraannya, dan madrasah belum mengimplementasikan pada buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, dari sisi konteks, input, proses, dan output masih ditemukan kesenjangan yang cukup berarti<sup>26</sup>. Dalam studi lainnya yang dilakukan pada salah satu madrasah yang menjadi *piloting project* juga mengalami hal hampir serupa.

Penelitian oleh Kresnawaty & Heliawati (2019)<sup>27</sup> mendapatkan hasil bahwa manajemen pembelajaran inklusif harus diformulasikan

---

<sup>25</sup> Sholikhah RM. 2016, Pendidikan Inklusif di Kementerian Agama (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah YAPPI Balong), tesis. tt. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta. hlm. 64.

<sup>26</sup> Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (*Pilot Project* 2015) yang di publish pada <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id>

<sup>27</sup> Kresnawaty, A., & Heliawati, R. Manajemen Pembelajaran Inklusif pada Anak Usia Dini. *Educhild: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 15–23,2019

dengan perencanaan yang matang. Pelaksanaan pembelajaran untuk reguler dan ABK digabung pada satu kelas yang sama. Sistem penilaian dilakukan sebulan sekali berupa penilaian narasi.

Penelitian Yuwono & Mirnawati (2021) Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk peserta didik ABK di Sekolah Dasar mencakup pengajaran remedial, strategi deduktif dan induktif, pendekatan heuristik, ekspositori, pembelajaran klasikal, pembelajaran kooperatif, serta teknik perubahan perilaku. Guru disarankan untuk menggunakan media pembelajaran yang cocok bagi siswa berkebutuhan khusus, seperti puzzle, untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penelitian Angreni & Sari (2022) dalam penelitiannya, berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan media, dan strategi pembelajaran yang relatif sama dengan siswa normal. Selama pelajaran, kelas dan model pelayanannya juga tidak berbeda dari siswa biasa. Meski demikian, beberapa sekolah telah memodifikasi proses pembelajaran, baik dalam hal rencana pembelajaran, media dan strategi pembelajaran.

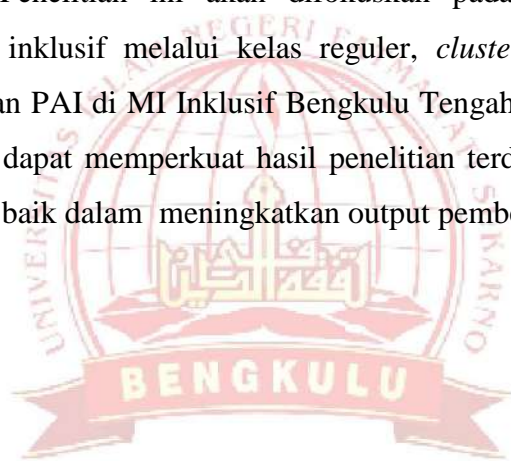
Penelitian oleh Margiyanto (2022)<sup>28</sup> mendapatkan hasil bahwa hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku pendidikan adalah kegiatan bagi anak usia dini di layanan pendidikan inklusif. Menghasilkan generasi yang berkualitas berasal dari layanan pendidikan inklusif untuk semua yang dikembangkan dan ditingkatkan. Penelitian Pangestuti dan

---

<sup>28</sup> Margiyanto. Implementasi Pengelolaan PAUD Inklusif di Kelompok Bermain. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(5), 6956–6962.2022

Darsinah (2023)<sup>29</sup> ditemukan bahwa pada pelaksanaan pembelajaran inklusif di PAUD dapat disediakan program tambahan yaitu program terapi anak berkebutuhan khusus. Terapi tahapan perkembangan ABK meliputi: (1) perilaku, (2) konsep bantu diri, (3) kemampuan motorik, (4) kemampuan akademik, (5) pemahaman konsep, (6) kemampuan bahasa dan komunikasi, (7) kemampuan adaptasi dan sosialisasi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini akan difokuskan pada model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler, *cluster* dan *pull out* pada pembelajaran PAI di MI Inklusif Bengkulu Tengah. Posisi penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu menjadi acuan dan praktik baik dalam meningkatkan output pembelajaran.



---

<sup>29</sup> Pangestuti, S.T. & Darsinah. Pembelajaran Inklusif pada Anak Usia Dini: Bagaimana Sistem Pengelolaannya?. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 7 (3), 3509-3518.2023